

**PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI RUANG DIGITAL: STUDI TENTANG PKS,  
NASDEM, DAN PAN**

**Imam Syahid<sup>1</sup>, Ilham Yuri Nanda<sup>2</sup>, Denny Amansyah<sup>3</sup>, Reyva Alviona Fernanda Priskilla<sup>4</sup>, Melina Rosyida<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim

Email Korespondensi: [imamsyahid@fisip.unmul.ac.id](mailto:imamsyahid@fisip.unmul.ac.id)

Email: [ilhamyurinanda@umrah.ac.id](mailto:ilhamyurinanda@umrah.ac.id); [denny.amansyah@lecturer.unri.ac.id](mailto:denny.amansyah@lecturer.unri.ac.id); [reyvaalviona@untad.ac.id](mailto:reyvaalviona@untad.ac.id);

[melinarosyida99@unwas.ac.id](mailto:melinarosyida99@unwas.ac.id)

**ABSTRACT**

Political party institutionalization in Indonesia is often understood through formal indicators and quantitative scores, while the way institutionalization is displayed in organizational practice and digital public space has received far less attention. This article addresses that issue by using the 2024 BRIN Political Party Institutionalization Index (IPPP) as an entry point to examine how parties with high institutionalization scores present their identity, structure, and organizational continuity. The study employs a qualitative-interpretive approach based on secondary data drawn from party statutes and bylaws, official websites, and official social media accounts of the three parties with the highest IPPP scores: the Prosperous Justice Party (PKS), the National Democratic Party (NasDem), and the National Mandate Party (PAN). The analysis uses Randall and Svåsand's framework of party institutionalization, particularly the dimensions of systemness, value infusion, decisional autonomy, and reification. The findings show that all three parties demonstrate relatively strong institutionalization, but through different patterns. PKS tends to display a more coherent form of institutionalization linking values, organizational structure, and communication. NasDem shows a pattern more strongly grounded in organizational effectiveness, continuity of political narrative, and the centrality of leadership figures. PAN, by contrast, occupies a more moderate position by combining structural stability, leadership symbolism, and institutional openness. This study argues that high institutionalization scores do not necessarily indicate a uniform model of party institutionalization. Instead, digital space is better understood as an arena through which party institutionalization is represented, negotiated, and made visible, rather than merely as a channel for political communication.

**Keywords:** Political Party Institutionalization, Digital Space, Party Social Media, Party Websites, IPPP.

**ABSTRAK**

Pelembagaan partai politik di Indonesia umumnya lebih sering dipahami melalui ukuran formal dan skor kuantitatif, sementara bagaimana pelembagaan itu ditampilkan dalam praktik organisasi dan ruang publik digital masih relatif jarang dibaca secara lebih dekat. Artikel ini berangkat dari persoalan tersebut dengan menempatkan Indeks Pelembagaan Partai Politik (IPPP) BRIN 2024 sebagai titik masuk untuk memahami bagaimana partai-partai dengan skor pelembagaan tinggi menampilkan identitas, struktur, dan keberlanjutan kelembagaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), website resmi, serta media sosial resmi tiga partai politik dengan skor IPPP tertinggi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka pelembagaan partai dari Randall dan Svåsand, terutama pada dimensi systemness, value infusion, decisional autonomy, dan reification. Hasil penelitian

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

459

Indexed



SINTA 4



menunjukkan bahwa ketiga partai tersebut sama-sama memperlihatkan upaya pelebagaan yang relatif kuat, tetapi melalui corak yang berbeda. PKS cenderung menampilkan pelebagaan yang lebih koheren antara nilai, struktur, dan komunikasi organisasi. NasDem lebih menonjolkan pelebagaan yang bertumpu pada efektivitas organisasi, kesinambungan narasi politik, dan sentralitas figur kepemimpinan. Sementara itu, PAN menunjukkan pola yang lebih moderat dengan memadukan stabilitas struktural, simbol kepemimpinan, dan keterbukaan kelembagaan. Artikel ini menunjukkan bahwa skor pelebagaan yang tinggi tidak selalu menunjuk pada model pelebagaan yang seragam, dan bahwa ruang digital lebih tepat dibaca sebagai arena representasi pelebagaan partai daripada sekadar saluran komunikasi politik.

**Kata kunci:** Pelebagaan Partai Politik, Ruang Digital, Media Sosial Partai, Website Partai, IPPP.

## PENDAHULUAN

Partai politik menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, melalui partai politik, proses rekrutmen kepemimpinan, representasi kepentingan, serta hubungan antara negara dan warga negara dapat dijalankan secara formal dalam sistem politik (Romli, 2016). Karena itu, pembicaraan mengenai partai politik tidak cukup apabila hanya diletakkan pada soal perolehan suara, kemenangan pemilu, atau keberhasilan elektoral semata. Partai politik perlu dilihat sebagai organisasi politik yang bekerja melalui aturan, rutinitas, pembagian kewenangan, dan kemampuan untuk menjaga keberlangsungan organisasinya dalam jangka panjang (Panebianco, 1988). Dalam konteks Indonesia, persoalan ini justru sering menjadi sumber kritik terhadap partai politik, yakni ketika partai tampak lebih kuat sebagai kendaraan elektoral dibanding sebagai organisasi yang memiliki konsistensi, identitas, dan daya tahan kelembagaan yang memadai (Mietzner, 2020; Solikhin, 2017).

Berangkat dari hal ini, pembahasan mengenai pelebagaan partai politik menjadi penting untuk ditempatkan sebagai pintu masuk untuk memahami kualitas partai sebagai institusi demokrasi. Dalam literatur politik, pelebagaan partai pada dasarnya merujuk pada proses ketika aturan, prosedur, dan nilai-nilai organisasi tertanam secara relatif stabil dalam kehidupan partai, sehingga partai tidak sepenuhnya bergantung pada figur tertentu dan tetap mampu bertahan di tengah perubahan politik yang berlangsung (Huntington, 1968; Randall & Svåsand, 2002). Dengan begitu, partai yang terlembaga tidak hanya hadir sebagai organisasi formal, tetapi juga harus mampu memperlihatkan keteraturan dalam menjalankan fungsi-fungsinya, yang memiliki identitas yang relatif konsisten, dan dapat mempertahankan keberlanjutan organisasinya. Ketika pelebagaan partai dibicarakan, perhatian tidak seharusnya berhenti pada keberadaan partai dalam arena elektoral, namun juga pada bagaimana partai itu bekerja, berkembang, dan dikenali sebagai institusi politik yang relatif stabil.

Pada saat yang sama, penting juga untuk membedakan antara pelebagaan partai politik dengan pelebagaan sistem kepartaian. Keduanya memang saling berkaitan, tetapi tidak dapat dipahami sebagai hal yang sama. Stabilitas hubungan antarpartai, keteraturan kompetisi elektoral, atau bertahannya pola persaingan politik dari satu pemilu ke pemilu berikutnya belum tentu menunjukkan bahwa partai-partai di dalamnya telah terlembaga dengan kuat sebagai organisasi. Dalam beberapa kasus yang terjadi, pelebagaan partai justru dapat berkembang dengan ritme yang berbeda dari pelebagaan sistem kepartaian itu sendiri (Casal Bértoa et al., 2024). Karena itu, pelebagaan partai perlu dibaca lebih dekat pada kapasitas partai sebagai organisasi politik yang berkelanjutan. Di Indonesia, persoalan ini menjadi relevan karena pembicaraan mengenai pelebagaan partai cukup sering hadir dalam nada normatif, tetapi belum selalu diikuti dengan pembacaan yang lebih dekat terhadap bagaimana pelebagaan itu tampak dalam praktik organisasi dan wajah institusional partai yang dapat diamati secara langsung (Kristiyanto et al., 2023; Tomsa, 2008).

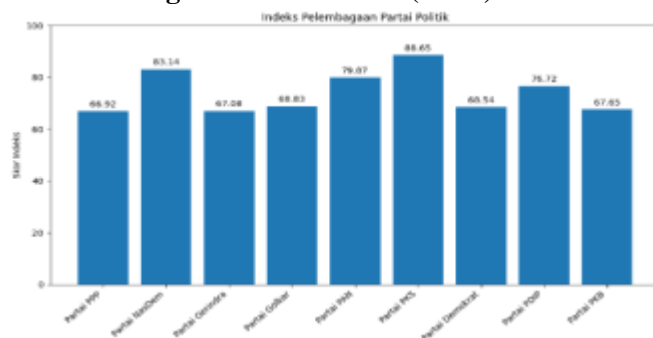
Untuk membantu membaca persoalan tersebut secara lebih operasional, pelebagaan partai politik yang dikembangkan oleh Randall & Svåsand (2002) memberi jalan untuk melihat pelebagaan partai sebagai proses yang dapat dibaca melalui beberapa dimensi yang lebih konkret, seperti *systemness*, *value*

*infusion, decisional autonomy, dan reification.* Kendati demikian, dalam artikel ini keempat dimensi tersebut tidak digunakan dalam kadar yang sama kuat. Hal ini terutama berkaitan dengan karakter data yang digunakan, yang lebih melihat pembacaan atas keteraturan organisasi, konsistensi identitas, dan citra publik partai, dibandingkan pengujian langsung terhadap otonomi keputusan internal. Dengan begitu, kerangka Randall dan Svåsand digunakan untuk melihat bagaimana pelembagaan partai tercermin dalam keteraturan aturan, internalisasi nilai, dan cara partai menampilkan dirinya sebagai institusi politik di hadapan publik.

Persoalan ini menjadi semakin menarik ketika ditempatkan dalam perkembangan politik kontemporer yang semakin dipengaruhi oleh ruang digital. Perkembangan teknologi digital telah memperluas arena partai politik dari ruang internal organisasi ke ruang publik yang dapat diamati secara lebih terbuka. Dalam situasi ini, website resmi dan media sosial partai tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai medium penting bagi partai untuk menampilkan identitas, struktur, orientasi, serta keberlanjutan organisasinya kepada publik (Chadwick, 2017; Gerbaudo, 2018). Melalui kanal digital, partai dapat memperlihatkan dirinya sebagai organisasi yang tertata, memiliki nilai, dan terus bekerja secara berkesinambungan. Namun demikian, ruang digital juga tidak sepenuhnya netral, ruang ini justru dapat memperkuat representasi figur tertentu, sehingga partai lebih menonjol sebagai perpanjangan dari kepemimpinan personal daripada sebagai entitas kolektif yang memiliki identitas kelembagaan yang kuat (Karvonen, 2014; Rahat & Kenig, 2018). Ruang digital perlu dibaca sebagai arena representasi institusional yang memperlihatkan bagaimana partai mengelola hubungan antara organisasi, identitas, dan figur kepemimpinan (de Holanda & Corrêa, 2021).

Dalam konteks Indonesia, upaya untuk melihat pelembagaan partai politik secara lebih sistematis tampak dalam peluncuran Indeks Pelembagaan Partai Politik (IPPP) oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2024 (BRIN, 2024). Kehadiran indeks memberikan gambaran awal mengenai tingkat pelembagaan partai politik melalui sejumlah indikator formal, seperti struktur organisasi, mekanisme kaderisasi, dan kepatuhan terhadap aturan internal partai. Meski demikian, sebagai ukuran yang bersifat agregat, IPPP tetap memperlihatkan posisi relatif suatu partai dalam tingkat pelembagaan, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana pelembagaan itu diwujudkan dalam organisasi partai dan bagaimana ia tampil di ruang publik. Dengan kata lain, angka yang tinggi belum tentu langsung memperlihatkan bentuk pelembagaan yang sama.

**Gambar 1: Skor Indeks Pelembagaan Partai Politik (IPPP) BRIN Periode Tahun 2019-2024**



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024 (diolah peneliti)

Hal ini terlihat dari variasi skor partai politik dalam IPPP BRIN. Di antara partai-partai yang diukur, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh skor 88,65, Partai NasDem 83,14, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 79,87, sehingga ketiganya berada dalam kelompok partai dengan tingkat pelembagaan relatif tinggi (BRIN, 2024). Ketiga partai ini menjadi menarik untuk diperhatikan bukan hanya karena berada pada posisi teratas, tetapi juga karena masing-masing memiliki latar organisasi, basis legitimasi, dan gaya representasi publik yang tidak sepenuhnya sama. Di sinilah pertanyaan ini muncul, apabila ketiganya sama-sama memiliki skor pelembagaan yang tinggi, apakah pelembagaan itu juga tampak dalam

bentuk yang serupa? Ataukah justru skor yang tinggi tersebut ditopang oleh pola organisasi, internalisasi nilai, dan representasi digital yang berbeda-beda?

Berangkat dari pertanyaan tersebut, artikel ini menganalisis pelebagaan partai politik di ruang digital melalui pembacaan atas dokumen formal dan kanal resmi partai, yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), website resmi, serta media sosial resmi partai. Analisis difokuskan pada PKS, NasDem, dan PAN sebagai tiga partai dengan skor IPPP tertinggi, agar dapat dilihat secara lebih komparatif bagaimana bentuk-bentuk pelebagaan itu ditampilkan. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menilai secara langsung praktik internal partai atau efektivitas politik masing-masing partai. Sebaliknya, fokus utama artikel ini terletak pada upaya membaca bagaimana pelebagaan partai direpresentasikan melalui aspek formal dan digital yang tersedia dan dapat diamati publik. Dengan demikian, artikel ini berusaha menjembatani pembacaan kuantitatif atas skor IPPP dengan pembacaan yang lebih kualitatif mengenai bagaimana pelebagaan partai tampak dalam organisasi dan tampilan resminya di ruang digital, sekaligus menunjukkan bahwa partai-partai dengan skor pelebagaan tinggi tidak selalu menampilkan pola kelembagaan yang identik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan memanfaatkan data sekunder untuk membaca pelebagaan partai politik di Indonesia sebagaimana direpresentasikan melalui dokumen formal dan platform digital resmi partai. Data penelitian bersumber dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), laporan dan publikasi kepartaian, serta website dan akun media sosial resmi partai. Objek penelitian ditentukan secara purposif dengan memilih tiga partai politik dengan skor Indeks Pelebagaan Partai Politik (IPPP) tertinggi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Amanat Nasional (PAN), dengan pertimbangan bahwa posisi tersebut dapat menjadi titik masuk untuk membaca bagaimana pelebagaan partai ditampilkan dalam bentuk formal dan digital. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan ke dalam tema-tema yang berkaitan dengan keteraturan organisasi, konsistensi identitas, narasi kelembagaan, dan representasi partai di ruang digital, kemudian dibaca menggunakan kerangka pelebagaan partai dari Randall dan Svåsand, terutama pada dimensi *systemness*, *value infusion*, *decisional autonomy*, dan *reification*, untuk melihat keterkaitan antara skor IPPP dan cara partai menampilkan pelebagaannya. Meskipun bertumpu pada data sekunder dan tidak mengakses secara langsung proses internal partai, pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana pelebagaan partai tercermin melalui aspek formal dan digital yang tersedia dan dapat diamati secara publik.

## PEMBAHASAN

Dalam praktik kepartaian di Indonesia, pelebagaan partai politik dapat dibaca melalui aturan formal melalui cara partai menampilkan dirinya di ruang publik. Dengan kehadiran website resmi, media sosial, serta dokumen organisasi yang dapat diakses secara terbuka membuat wajah institusional partai semakin mudah diamati. Dalam konteks ini, pelebagaan menjadi penting karena berkaitan dengan kemampuan partai dalam menjaga keteraturan organisasi, dan dapat menunjukkan sejauh mana partai mampu mempertahankan identitas, konsistensi, dan keberlanjutan kelembagaannya, tanpa hanya bertumpu pada figur pemimpin atau momentum elektoral.

Berangkat dari hal tersebut, pembahasan pada bagian ini difokuskan pada tiga ranah utama yang dianggap paling relevan untuk membaca bagaimana pelebagaan partai direpresentasikan. Pertama, ranah aturan formal yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yang memperlihatkan bagaimana partai membangun struktur, kewenangan, dan orientasi organisasinya. Kedua, website resmi partai yang berfungsi sebagai ruang institusional untuk menampilkan struktur, agenda, dan identitas partai kepada publik. Ketiga, media sosial resmi partai yang menjadi arena komunikasi sekaligus ruang untuk melihat bagaimana identitas dan keberlanjutan kelembagaan dipertahankan dalam interaksi

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

462

Indexed



SINTA 4



digital sehari-hari. Dengan demikian, pembahasan ini diarahkan untuk membaca bagaimana pelebagaan partai ditampilkan dan dipertahankan melalui aspek formal dan digital yang tersedia bagi publik.

Melalui tiga ranah tersebut, tampak bahwa partai-partai dengan skor pelebagaan tinggi tidak selalu menampilkan pola kelembagaan yang sama. Pada tingkat tertentu, ketiganya sama-sama menunjukkan adanya upaya untuk membangun keteraturan organisasi dan menjaga keberadaan partai sebagai institusi yang terus bekerja. Namun, ketika dibaca lebih dekat, terdapat perbedaan yang cukup jelas dalam cara setiap partai mengelola aturan, menampilkan identitas, dan membangun relasi dengan publik. Perbedaan inilah yang menjadi titik penting dalam pembahasan berikut, sebab dari sanalah dapat dilihat bahwa pelebagaan partai politik berlangsung melalui bentuk-bentuk yang berbeda sesuai dengan orientasi organisasi, basis legitimasi, dan strategi representasi yang dikembangkan oleh masing-masing partai.

## AD/ART Partai Politik dan Pelebagaan Normatif

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan salah satu instrumen paling penting dalam membaca pelebagaan partai politik pada tingkat formal. Melalui AD/ART, dapat dilihat bagaimana partai mendefinisikan asas, tujuan, struktur organisasi, pembagian kewenangan, mekanisme kaderisasi, serta pola pengambilan keputusan yang menjadi dasar kehidupan internal partai. Dalam konteks ini, pelebagaan normatif menunjuk pada sejauh mana aturan tersebut membentuk keteraturan organisasi, mengikat orientasi nilai, dan memberi arah yang relatif jelas bagi jalannya partai sebagai institusi politik. Karena itu, pembacaan terhadap AD/ART menjadi penting untuk melihat bagaimana partai membangun dirinya pada level formal, sekaligus untuk membedakan apakah pelebagaan yang tinggi ditopang oleh fondasi organisasi yang serupa atau justru berbeda.

Jika dilihat dari AD/ART yang dimiliki, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperlihatkan pola pelebagaan normatif yang relatif kuat, terutama karena hubungan antara asas ideologis, struktur organisasi, dan mekanisme kaderisasi dibangun secara cukup tegas. Dalam dokumen formalnya, PKS menempatkan Islam sebagai asas partai yang eksplisit dan mengikat, yang kemudian diterjemahkan ke dalam struktur organisasi yang bertingkat, mekanisme kaderisasi yang berjenjang, serta sistem pengambilan keputusan yang terpusat melalui lembaga-lembaga seperti Majelis Syura dan Dewan Syariah. Dengan susunan seperti ini, AD/ART PKS berfungsi sebagai medium yang menegaskan identitas partai dan mengatur keterhubungan antara nilai, struktur, dan disiplin organisasi.

Kendati demikian, kuatnya pelebagaan normatif PKS juga dibangun melalui pola organisasi yang cenderung tersentralisasi. Partisipasi anggota tidak berlangsung dalam bentuk yang sepenuhnya terbuka, melainkan lebih banyak dimediasi oleh struktur dan otoritas kelembagaan yang telah ditetapkan. Dalam arti tertentu, hal ini menunjukkan bahwa pelebagaan PKS bertumpu pada loyalitas, disiplin, dan internalisasi nilai yang relatif kuat. Temuan ini sejalan dengan pembacaan Sedriyani (2021), yang menunjukkan bahwa PKS relatif mampu mempertahankan basis dukungannya melalui jaringan afiliasi non-formal seperti komunitas dakwah, organisasi sosial, dan jaringan kader ideologis. Jika dibaca melalui kerangka Randall & Svåsand, (2002), PKS cenderung menampilkan *systemness* dan *value infusion* yang lebih menonjol, sebab keteraturan organisasi dan internalisasi nilai tampak saling menopang dalam desain formal partai.

Berbeda dengan PKS, AD/ART Partai NasDem menunjukkan pelebagaan normatif yang lebih bertumpu pada rasionalisasi organisasi dan efektivitas kontrol kelembagaan. Dalam dokumen formalnya, pemisahan antara AD dan ART memperlihatkan pembagian yang relatif tegas antara perumusan prinsip umum partai dan pengaturan operasional organisasi. Pada satu sisi, AD NasDem menonjolkan narasi restorasi dan perubahan sebagai identitas politik partai. Namun pada sisi yang lain, ART memperlihatkan penguatan kewenangan elite pusat, khususnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Majelis Tinggi dalam mengendalikan struktur organisasi, proses rekrutmen, serta hubungan dengan tingkat daerah. Dengan kata lain, pelebagaan normatif NasDem dibangun dari adanya desain organisasi yang menekankan efektivitas, kontrol, dan keteraturan dari atas (*top down*).

Pola tersebut juga diperkuat oleh penekanan partai terhadap etika politik, transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai prinsip yang dilembagakan melalui aturan internal dan kode etik partai (Ba'dawi et al., 2024). Meski demikian, orientasi itu tetap berjalan dalam kerangka organisasi yang memberi ruang lebih besar pada kontrol elite dibanding perluasan partisipasi anggota. Karena itu, NasDem tetap memperlihatkan *systemness* yang relatif tinggi, tetapi *value infusion* cenderung hadir dalam bentuk yang lebih administratif dan simbolik, tidak sekuat pola internalisasi ideologis yang tampak pada PKS. Dari sini mulai terlihat bahwa skor pelebagaan yang tinggi tidak selalu menunjuk pada model kelembagaan yang sama. PKS membangun pelebagaan melalui disiplin ideologis dan struktur kader, sedangkan NasDem lebih menekankan stabilitas organisasi melalui efektivitas kontrol dan sentralisasi kewenangan.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menunjukkan pola pelebagaan normatif yang cenderung berada di antara keduanya. AD/ART PAN memperlihatkan adanya keteraturan organisasi melalui struktur yang hierarkis dan pembagian kewenangan yang relatif jelas. Pada level formal, hal ini menunjukkan bahwa PAN tetap memiliki fondasi organisasi yang cukup tertata. Akan tetapi, dibandingkan PKS, dokumen formal PAN tidak memperlihatkan keterikatan yang sama kuat antara struktur, kaderisasi, pengambilan keputusan, dan internalisasi nilai ideologis.

Kondisi tersebut tampak berkaitan dengan posisi PAN yang dalam banyak hal ditopang oleh relasi sosial-politik di luar struktur formal partai, terutama kedekatannya dengan jaringan Muhammadiyah sebagai basis legitimasi dan sumber daya politik (Rahmayanti & Siregar, 2025). Namun begitu, relasi tersebut tidak sepenuhnya dilembagakan secara eksplisit dalam desain organisasi partai. Akibatnya, PAN memang memperlihatkan *systemness* yang relatif stabil pada level struktural, tetapi pada dimensi *value infusion* pelebagaannya cenderung lebih cair. Dalam konteks ini, PAN dapat dibaca sebagai *middle case* di antara PKS dan NasDem: tidak seideologis dan sedisiplin PKS, tetapi juga tidak sekuat NasDem dalam menampilkan kontrol organisasi yang terkonsentrasi pada elite pusat.

Jika ketiga partai tersebut dibaca secara komparatif, tampak bahwa AD/ART mereka sama-sama menunjukkan adanya fondasi kelembagaan formal, tetapi dengan corak yang berbeda. PKS cenderung menampilkan pelebagaan normatif yang paling koheren antara nilai, struktur, dan kaderisasi. NasDem memperlihatkan pelebagaan yang bertumpu pada efektivitas organisasi dan kontrol elite. Sementara itu, PAN menunjukkan keteraturan struktural yang cukup stabil, tetapi dengan internalisasi nilai yang lebih longgar dan penopang legitimasi yang sebagian datang dari luar mekanisme formal partai. Dengan demikian, pada ranah AD/ART dapat dilihat bahwa skor pelebagaan yang relatif tinggi tidak merepresentasikan satu model pelebagaan tunggal. Sebaliknya, pelebagaan justru tampil sebagai proses yang bersifat selektif, di mana setiap partai dapat kuat pada dimensi tertentu, tetapi tidak secara otomatis sama kuatnya pada dimensi yang lain.

## Website Resmi Partai sebagai Representasi Institusional Digital

Dalam perkembangan politik digital saat ini, website resmi partai politik tidak lagi hanya berfungsi sebagai saluran informasi yang bersifat administratif. Lebih dari itu, website telah menjadi salah satu ruang penting bagi partai untuk memperkenalkan dirinya sebagai organisasi politik yang memiliki struktur, identitas, agenda, dan arah kelembagaan yang relatif jelas. Melalui pilihan menu, susunan informasi, intensitas pembaruan konten, hingga figur atau simbol yang ditampilkan di halaman utama, website dapat memperlihatkan bagaimana partai menata wajah institusionalnya di hadapan publik (Butoracová Šindlerová & Garaj, 2022). Karena itu, pembacaan terhadap website resmi partai menjadi relevan untuk melihat bagaimana pelebagaan partai tidak hanya hadir dalam bentuk aturan formal, tetapi juga dalam cara partai menampilkan dirinya secara digital.

Pada titik ini, website dapat dibaca sebagai salah satu medium yang menghubungkan struktur internal partai dengan representasi publiknya. Website yang dikelola secara berkelanjutan, memuat informasi kelembagaan yang relatif lengkap, serta menampilkan narasi yang konsisten, dapat mengindikasikan adanya upaya partai untuk menjaga keteraturan organisasi sekaligus membangun legitimasi di ruang

publik. Sebaliknya, website yang lebih banyak bertumpu pada figur atau pemberitaan tertentu juga dapat menunjukkan bahwa representasi kelembagaan partai dibangun melalui pola yang berbeda. Dalam konteks artikel ini, pembacaan terhadap website resmi PKS, NasDem, dan PAN memperlihatkan bahwa ketiga partai sama-sama hadir secara digital, tetapi menampilkan corak kelembagaan yang tidak sepenuhnya sama.

**Gambar 2: Website Resmi PKS**



Sumber: <https://pks.id/> (diolah peneliti, 2026)

Jika dilihat dari tampilan awal website resminya, PKS memperlihatkan kecenderungan yang cukup kuat untuk menempatkan identitas partai sebagai pintu masuk utama dalam interaksi publik. Hal ini tampak dari penegasan tagline “Kenali PKS Lebih Dekat”, yang tidak sekadar berfungsi sebagai ajakan simbolik, tetapi juga memberi kesan bahwa website diposisikan sebagai medium untuk memperkenalkan partai sebagai organisasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Ketersediaan menu yang menghubungkan publik dengan informasi internal partai, jaringan kepengurusan, hingga struktur daerah, menunjukkan bahwa representasi digital PKS tidak hanya diarahkan pada penyampaian berita, tetapi juga pada penegasan organisasi sebagai fondasi utama partai.

Kecenderungan tersebut semakin terlihat dari relatif minimnya penonjolan figur personal di halaman awal. Dibanding menempatkan satu tokoh sebagai pusat tampilan, website PKS lebih banyak mengarahkan perhatian pada struktur, jaringan organisasi, serta aktivitas kelembagaan partai. Dalam konteks kelembagaan, pola ini mengindikasikan bahwa website PKS digunakan untuk memperkuat citra partai sebagai institusi yang bekerja melalui aturan, jaringan, dan rutinitas organisasi. Pada saat yang sama, keberadaan konten yang cukup beragam, seperti berita kegiatan, opini, dokumentasi, dan video, juga memperlihatkan adanya ritme komunikasi yang terkelola secara relatif rutin. Pola ini menunjukkan bahwa bagi PKS, website bukan sekadar etalase digital, tetapi bagian dari upaya menjaga kesinambungan representasi organisasi di ruang publik (Boestam et al., 2023).

**Gambar 3: Website Resmi Partai Nasdem**



Sumber: <https://nasdem.id/> (diolah peneliti, 2026)

Berbeda dengan PKS, website NasDem memperlihatkan orientasi yang lebih kuat pada komunikasi publik dan produksi pemberitaan. Halaman awal website NasDem lebih didominasi oleh menu berita, baik yang bersifat nasional, daerah, fraksi, maupun opini, disertai dengan ajakan “Jangan Ketinggalan Berita”

yang menegaskan fungsi website sebagai kanal utama untuk menyampaikan aktivitas dan posisi politik partai. Dengan susunan seperti itu, website NasDem lebih tampak sebagai ruang komunikasi politik yang aktif daripada sebagai ruang yang secara langsung menonjolkan kedalaman struktur kelembagaan internalnya.

Kehadiran figur Surya Paloh sebagai “Bapak Restorasi Indonesia” di halaman utama juga memperkuat kesan bahwa representasi digital NasDem dibangun melalui narasi kepemimpinan dan gagasan besar perubahan. Dalam hal ini, figur tidak sepenuhnya menggantikan partai, tetapi menjadi titik rujuk yang penting dalam membangun identitas kelembagaan NasDem. Artinya, legitimasi institusional partai dalam website resmi tidak terutama dibangun melalui penegasan organisasi dari bawah ke atas, melainkan melalui kombinasi antara komunikasi publik, sentralitas figur, dan narasi politik yang terus diulang. Dengan demikian, jika PKS menampilkan institusionalitas melalui struktur dan jaringan organisasi, NasDem cenderung menampilkan pelembagaan digital melalui kontinuitas pesan, konsistensi pemberitaan, dan penguatan citra kepemimpinan (Karvonen, 2014; Rahat & Kenig, 2018).

Dari sini dapat dilihat bahwa website NasDem tetap menunjukkan *systemness* dalam arti adanya keteraturan komunikasi dan keberlanjutan representasi partai, tetapi coraknya berbeda dari PKS. Pelembagaan yang tampak pada website NasDem lebih diarahkan pada pengelolaan citra, kesinambungan narasi, dan stabilitas komunikasi publik, sementara aspek kelembagaan internal hadir dalam bentuk yang lebih tersirat. Karena itu, website NasDem mengindikasikan bahwa pelembagaan partai di ruang digital tidak selalu ditampilkan melalui struktur organisasi yang tegas, tetapi dapat pula dibangun melalui dominasi narasi politik yang dikaitkan dengan figur sentral partai.

**Gambar 4: Website Resmi PAN**



Sumber: <https://pan.or.id/> (diolah peneliti, 2026)

Sementara itu, website PAN menunjukkan pola yang cenderung berada di antara PKS dan NasDem. Pada satu sisi, halaman awal website PAN tetap menampilkan figur Zulkifli Hasan sebagai ketua umum, lengkap dengan pesan “Saudaraku, mari kita sambut kemenangan PAN”, sehingga unsur kepemimpinan tetap hadir secara simbolik sebagai bagian dari wajah partai. Namun pada sisi yang lain, penonjolan figur tersebut tidak tampil sekuat pola personalisasi yang terlihat pada NasDem. Website PAN masih memberi ruang yang cukup bagi identitas organisasi melalui menu seperti profil partai, platform PAN, fraksi PAN, dan sejumlah informasi kelembagaan lainnya.

Hal yang cukup menonjol dari website PAN justru terletak pada keterbukaan informasi yang ditampilkan. Kehadiran informasi publik seperti profil PPID dan rencana penggunaan dana bantuan politik menunjukkan adanya upaya partai untuk membangun legitimasi melalui transparansi administratif. Dalam konteks ini, website PAN tampak tidak hanya digunakan untuk kepentingan pencitraan politik, tetapi juga sebagai medium yang memperlihatkan akuntabilitas kelembagaan partai di ruang digital. Praktik seperti ini dapat dibaca sebagai upaya menjaga kepercayaan publik, sekaligus menegaskan bahwa partai hadir sebagai organisasi yang memiliki struktur, dokumen, dan mekanisme informasi yang dapat diakses (Kluver et al., 2007). Jika dibandingkan dengan PKS dan NasDem, website PAN memperlihatkan bentuk pelembagaan digital yang lebih moderat. Ia tidak sekuat PKS dalam menonjolkan jaringan organisasi dan tidak seintens NasDem dalam membangun website sebagai kanal komunikasi politik berbasis figur.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

466

Indexed



SINTA 4



Sebaliknya, PAN cenderung menempatkan website sebagai ruang representasi organisasi yang menggabungkan simbol kepemimpinan, informasi kelembagaan, dan keterbukaan administratif secara relatif seimbang. Dalam arti itu, pelembagaan digital PAN tampak bekerja melalui upaya menjaga stabilitas citra organisasi tanpa sepenuhnya mengandalkan penegasan ideologis ataupun personalisasi figur secara dominan.

Jika ketiga website resmi partai tersebut dibaca secara komparatif, terlihat bahwa masing-masing menampilkan corak institusional yang berbeda. Website PKS cenderung menegaskan organisasi sebagai fondasi utama representasi digital partai, dengan penekanan pada struktur, jaringan, dan kesinambungan komunikasi kelembagaan. Website NasDem, sebaliknya, lebih menonjolkan komunikasi publik, konsistensi narasi politik, dan sentralitas figur sebagai penopang identitas partai. Sementara itu, website PAN menunjukkan kecenderungan yang lebih moderat dengan memadukan simbol kepemimpinan, informasi organisasi, dan keterbukaan administratif. Temuan ini menunjukkan bahwa pada ranah website resmi, partai-partai dengan skor pelembagaan tinggi memang sama-sama berupaya menampilkan dirinya sebagai institusi politik yang stabil, tetapi melakukannya melalui strategi representasi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, pelembagaan digital pada level website tidak hadir dalam satu bentuk tunggal, melainkan mengikuti orientasi organisasi dan pola legitimasi yang dikembangkan oleh masing-masing partai.

## Media Sosial dan Pelembagaan Komunikatif Partai Politik

Dalam perkembangan politik digital yang semakin intens, media sosial telah menjadi salah satu arena penting bagi partai politik untuk membangun dan mempertahankan kehadirannya di ruang publik. Jika website cenderung menampilkan wajah institusional partai dalam bentuk yang lebih tertata dan formal, maka media sosial memperlihatkan bagaimana partai hadir dalam ritme komunikasi yang lebih dinamis, real-time, dan dekat dengan publik. Melalui media sosial, partai tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk narasi, menegaskan identitas, memproduksi citra, dan membangun keterhubungan dengan konstituen melalui aliran konten yang terus diperbarui. Karena itu, media sosial dapat dibaca sebagai ruang yang penting untuk melihat bagaimana pelembagaan partai bekerja pada tingkat komunikatif, yakni bagaimana struktur, nilai, dan keberlanjutan organisasi ditampilkan dalam interaksi digital sehari-hari (Hardiyanto et al., 2023).

Dalam konteks ini, pelembagaan komunikatif tidak semata-mata diukur dari kehadiran akun resmi partai, melainkan dari bagaimana akun tersebut dikelola secara konsisten, jenis konten apa yang diproduksi, siapa atau apa yang lebih ditonjolkan, serta bagaimana partai membangun kesinambungan identitas di berbagai platform. Pada satu sisi, media sosial dapat memperkuat pelembagaan ketika digunakan untuk menegaskan organisasi, simbol partai, kegiatan struktural, dan posisi politik yang relatif konsisten. Namun pada sisi lain, media sosial juga dapat memperbesar personalisasi ketika komunikasi partai lebih bertumpu pada figur, citra elite, dan branding politik yang berpusat pada tokoh tertentu. Karena itu, pembacaan terhadap media sosial PKS, NasDem, dan PAN menjadi penting untuk melihat bagaimana masing-masing partai membangun pelembagaan partai di ruang digital, sekaligus untuk menangkap batas-batas pelembagaan yang mungkin hanya hadir dalam bentuk simbolik dan komunikatif (Masullo et al., 2022).

**Gambar 5: Media Sosial PKS**



Sumber: Diolah peneliti, 2026

Jika dilihat dari akun media sosial resminya, PKS memperlihatkan kecenderungan yang relatif kuat untuk menempatkan identitas partai sebagai pusat komunikasi. Hal ini tampak dari konsistensi penggunaan simbol partai, penekanan pada aktivitas organisasi, serta relatif terbatasnya dominasi figur tertentu dalam keseluruhan tampilan akun dan pola produksi kontennya. Dalam konteks ini, media sosial PKS tidak semata hadir sebagai ruang promosi politik yang berpusat pada tokoh, tetapi lebih sebagai medium yang menjaga kesinambungan identitas kelembagaan partai di ruang digital. Bahkan ketika media sosial pada umumnya mendorong personalisasi dan branding berbasis figur, PKS masih memperlihatkan upaya untuk mempertahankan kontrol institusional atas komunikasi politiknya (Skogerbø & Karlsen, 2021).

Pola tersebut tampak dari jenis konten yang diunggah, yang relatif banyak menampilkan kegiatan kader, program sosial, pernyataan sikap politik, dan dokumentasi aktivitas partai di berbagai tingkatan. Keseragaman identitas antarplatform juga memberi kesan bahwa komunikasi digital PKS dikelola dalam kerangka organisasi yang cukup terkoordinasi, bukan hanya sebagai respons sesaat terhadap momentum politik tertentu. Dalam arti ini, media sosial PKS memperlihatkan kesinambungan antara identitas partai, aktivitas organisasi, dan ritme komunikasi yang rutin. Karena itu, jika dibaca dalam kerangka pelembagaan, media sosial PKS menunjukkan kecenderungan bahwa ruang digital digunakan untuk memperluas dan memperkuat keberlanjutan organisasi, sekaligus menjaga agar partai tetap dikenali sebagai institusi yang bekerja melalui jaringan dan struktur, bukan hanya melalui figur (Vaccari & Valeriani, 2021).

Dengan demikian, pelembagaan komunikatif PKS tampak bertumpu pada konsistensi identitas institusional. Media sosial berfungsi bukan hanya sebagai saluran penyebaran pesan, tetapi juga sebagai ruang untuk mempertahankan kesinambungan organisasi di hadapan publik. Dalam konteks ini, PKS menunjukkan bahwa media sosial masih dapat dikelola dalam logika yang relatif institusional, di mana partai berupaya menjaga agar komunikasi digital tetap terhubung dengan struktur dan aktivitas organisasinya.

**Gambar 6: Media Sosial Nasdem**



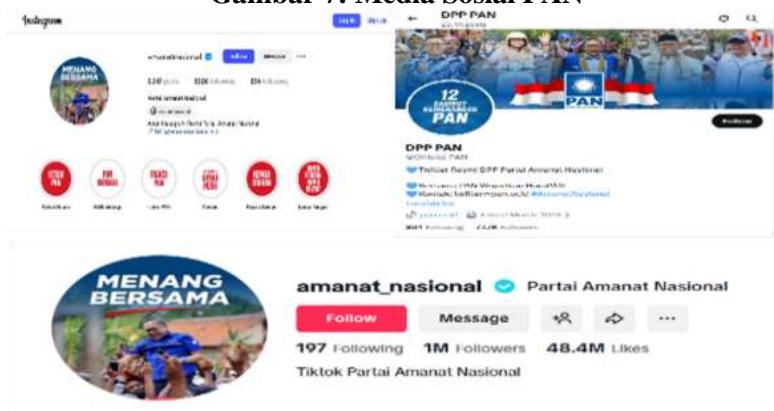
Sumber: Diolah peneliti, 2026

Berbeda dengan PKS, media sosial NasDem memperlihatkan orientasi komunikasi yang jauh lebih kuat pada narasi politik dan figur kepemimpinan. Dalam tampilan akun maupun pola kontennya, identitas partai lebih banyak dihubungkan dengan gagasan besar perubahan serta figur sentral Surya Paloh sebagai rujukan utama arah politik partai. Konten yang diunggah tidak hanya menampilkan aktivitas kepartaian, tetapi juga membangun *political branding* yang kuat melalui narasi restorasi, pernyataan elite, dan framing isu-isu nasional. Dengan pola seperti ini, media sosial NasDem memperlihatkan bahwa komunikasi partai di ruang digital lebih banyak ditopang oleh narasi dan figur daripada oleh penegasan organisasi secara langsung (Kreiss et al., 2020).

Hal tersebut tampak dari intensitas konten yang relatif tinggi dan dominasi pemberitaan politik yang dikaitkan dengan posisi partai maupun pernyataan para elite. Berbeda dari PKS yang lebih banyak menampilkan kegiatan organisasi sebagai basis identitas, NasDem cenderung menempatkan media sosial sebagai arena strategis untuk menjaga visibilitas politik partai melalui kesinambungan pesan dan citra. Dalam konteks ini, relasi dengan publik dibangun terutama melalui eksposur isu, narasi perubahan, dan sentralitas figur yang terus dihadirkan secara berulang. Karena itu, jika media sosial PKS mengarah pada pelembagaan yang lebih institusional, maka media sosial NasDem menunjukkan pelembagaan komunikatif yang lebih kuat pada pengelolaan citra, stabilitas pesan, dan penguatan legitimasi melalui figur sentral (Jungherr et al., 2020).

Pola ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa pelembagaan partai di ruang digital tidak selalu identik dengan penguatan organisasi dalam arti struktural. Dalam kasus NasDem, partai tetap tampak hadir secara konsisten dan aktif, tetapi kehadiran tersebut lebih banyak diwujudkan melalui komunikasi publik yang berpusat pada narasi dan kepemimpinan. Dengan demikian, media sosial NasDem memperlihatkan bahwa pelembagaan komunikatif dapat berjalan beriringan dengan personalisasi, di mana partai tetap terjaga sebagai institusi yang terlihat aktif, tetapi citra kelembagaannya sangat ditopang oleh figur dan pesan politik yang tersentralisasi.

**Gambar 7: Media Sosial PAN**



Sumber: Diolah peneliti, 2026

Sementara itu, media sosial PAN memperlihatkan orientasi komunikasi yang berada di antara dua pola tersebut. Pada satu sisi, kehadiran figur Zulkifli Hasan sebagai ketua umum tetap cukup menonjol pada tampilan profil dan sebagian konten awal, sehingga unsur kepemimpinan tetap hadir sebagai penanda identitas partai. Namun pada sisi yang lain, figur tersebut tidak sepenuhnya mendominasi keseluruhan komunikasi digital PAN. Akun resmi partai masih memberi ruang bagi aktivitas kepartaian, kerja fraksi, pernyataan politik, dan pesan-pesan mobilisasi kolektif yang menunjukkan bahwa partai tetap berusaha menampilkan dirinya sebagai organisasi, bukan semata sebagai kendaraan figur.

Pola tersebut menunjukkan bahwa PAN menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara simbol kepemimpinan dan identitas kelembagaan. Strategi semacam ini membuat media sosial PAN tidak bergerak sepenuhnya ke arah institusional seperti PKS, tetapi juga tidak terlalu

kuat terseret ke pola personalisasi seperti NasDem. Keberagaman tema konten yang diunggah, serta kesinambungan unggahan di berbagai platform, memperlihatkan bahwa komunikasi PAN dikelola secara cukup rutin dan terjaga, meskipun tidak seintens NasDem dalam hal pemberitaan politik atau sekoheren PKS dalam hal penegasan identitas institusional. Dalam arti ini, ritme komunikasi PAN menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan eksistensi partai di ruang digital dengan tetap menjaga hubungan antara struktur organisasi dan simbol kepemimpinan (Baldwin-Philippi, 2020).

Integrasi antara media sosial PAN dan struktur formal partai juga masih tampak melalui konten-konten yang menampilkan jejaring kepengurusan dan aktivitas organisasi di berbagai tingkat. Namun, dibandingkan dengan PKS, integrasi tersebut tidak selalu tampil sebagai identitas utama komunikasi partai. Karena itu, pelembagaan komunikatif PAN dapat dibaca sebagai bentuk yang lebih moderat: cukup terorganisasi untuk menjaga kesinambungan identitas partai, tetapi tidak sepenuhnya dilembagakan melalui disiplin simbolik yang kuat. Dengan kata lain, PAN menunjukkan pola komunikasi digital yang cenderung seimbang, di mana media sosial digunakan sekaligus untuk menjaga citra organisasi dan memanfaatkan daya tarik simbolik kepemimpinan.

Jika dibaca secara komparatif, media sosial ketiga partai tersebut menunjukkan bahwa pelembagaan komunikatif di ruang digital juga tidak hadir dalam satu bentuk tunggal. PKS cenderung menggunakan media sosial untuk memperkuat kontinuitas identitas institusional dan aktivitas organisasi. NasDem, sebaliknya, lebih banyak menampilkan pelembagaan komunikatif melalui intensitas narasi politik, konsistensi pesan, dan sentralitas figur kepemimpinan. Sementara itu, PAN berada di posisi antara keduanya dengan pola komunikasi yang lebih moderat dan relatif seimbang antara organisasi dan simbol kepemimpinan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pada ranah media sosial, partai-partai dengan skor pelembagaan tinggi memang sama-sama aktif membangun kehadiran digital, tetapi melakukannya melalui strategi yang berbeda-beda. Dengan demikian, pelembagaan partai di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan seberapa hadir partai di media sosial, tetapi juga dengan bagaimana kehadiran itu diatur, diarahkan, dan dimaknai dalam hubungan antara organisasi, identitas, dan figur politik.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelembagaan partai politik di ruang digital tidak tampil dalam pola yang seragam, bahkan di antara partai-partai yang sama-sama memperoleh skor tinggi dalam Indeks Pelembagaan Partai Politik (IPPP). Melalui pembacaan terhadap AD/ART, website resmi, dan media sosial resmi, terlihat bahwa PKS, NasDem, dan PAN sama-sama berupaya menegaskan diri sebagai institusi yang teratur dan berkelanjutan, tetapi melalui corak yang berbeda. PKS cenderung menampilkan pelembagaan yang lebih koheren antara nilai, struktur, dan komunikasi organisasi. NasDem lebih bertumpu pada efektivitas organisasi, kesinambungan narasi politik, dan sentralitas figur kepemimpinan. Sementara itu, PAN berada pada posisi yang lebih moderat, dengan stabilitas struktural yang cukup terjaga, tetapi dengan internalisasi nilai dan representasi kelembagaan yang lebih cair.

Temuan ini menegaskan bahwa skor pelembagaan yang tinggi tidak serta-merta menunjuk pada satu model pelembagaan yang sama. Pelembagaan partai justru tampil sebagai proses yang beragam dan selektif, di mana setiap partai dapat kuat pada dimensi tertentu, tetapi tidak selalu sama kuat pada dimensi yang lain. Dalam konteks ini, ruang digital penting dipahami bukan hanya sebagai saluran komunikasi politik, tetapi juga sebagai arena tempat partai menampilkan struktur, identitas, dan legitimasi kelembagaannya. Pada saat yang sama, ruang digital juga memperlihatkan bahwa pelembagaan partai dapat berjalan beriringan dengan personalisasi ketika figur lebih dominan daripada organisasi.

Secara lebih luas, artikel ini menunjukkan bahwa skor IPPP perlu dibaca bukan sekadar sebagai angka agregat, tetapi sebagai pintu masuk untuk memahami bagaimana pelembagaan partai ditampilkan dalam organisasi dan ruang publik digital. Namun, karena penelitian ini bertumpu pada dokumen formal dan kanal resmi partai, praktik internal partai belum dapat dijangkau secara langsung. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada relasi antara struktur formal, praktik organisasi sehari-hari, dan

respons publik agar pelembagaan partai dapat dipahami tidak hanya pada tingkat tampilan institusional, tetapi juga dalam cara kerjanya secara nyata.

## REFERENSI

- Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 2024, 115 (2024).
- Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2025, 62 (2025).
- Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Tahun 2024, 75 (2024).
- Ba'dawi, M. A., Ahdavi, M., Drajat, M. I., Hasibuan, A. T. A., Damanik, K., & Lubis, D. A. (2024). Peran Partai Nasdem dalam Membangun Etika Politik. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(1), 1498–1506. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i1.2606>
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). *BRIN Luncurkan Indeks Pelembagaan Partai Politik Pertama di Indonesia*. <https://www.brin.go.id/news/121336/brin-luncurkan-indeks-pelembagaan-partai-politik-pertama-di-indonesia>
- Baldwin-Philippi, J. (2020). Data Ops, Objectivity, and Outsiders: Journalistic Coverage of Data Campaigning. *Political Communication*, 37(4), 468–487. <https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1723751>
- Boestam, A. B., Prakosa, A., & Avianto, B. N. (2023). Upaya Partai Politik dalam Memanfaatkan Demokrasi Virtual di Era Digital. *Jurnal Pustaka*. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i1.2281>
- Butoracová Šindleryová, I., & Garaj, M. (2022). The Potential of Using Websites for Communication of Political Parties: The Case of Slovakia Before the 2020 Elections. *Slovak Journal of Political Sciences*, 22(2 SE-Articles), 209–242. <https://doi.org/10.34135/sjps.220203>
- Casal Bértoa, F., Enyedi, Z., & Mölder, M. (2024). Party and Party System Institutionalization: Which Comes First? *Perspectives on Politics*, 22(1), 194–212. <https://doi.org/10.1017/S1537592723002530>
- Chadwick, A. (2017). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford University Press.
- de Holanda, A. F. B., & Corrêa, C. H. W. (2021). Websites as Spaces for Building the Identities of Political Parties. In *Present and Future Paradigms of Cyberculture in the 21st Century* (pp. 55–78). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8024-9.ch004>
- Gerbaudo, P. (2018). *The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy*. Pluto Press.
- Hardiyanto, D., Wijaya, M., & Satyawan, I. A. (2023). Political Marketing Strategies Through Social Media Tools in Indonesia. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, 2(3 SE-Articles), 425–438. <https://doi.org/10.55927/fjss.v2i3.5753>
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Jungherr, A., Rivero, G., Rodríguez, G. R., & Gayo-Avello, D. (2020). *Retooling Politics: How Digital Media are Shaping Democracy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108297820>
- Karvonen, L. (2014). *The Personalisation of Politics: A Study of Parliamentary Democracies*. ECPR press.
- Kluver, R., Jankowski, N., Foot, K., & Schneider, S. M. (2007). *The Internet and National Elections: A Comparative Study of Web Campaigning*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203961926>
- Kreiss, Daniel, Lawrence, Regina G., & McGregor, Shannon C. (2020). Political Identity Ownership: Symbolic Contests to Represent Members of the Public. *Social Media + Society*, 6(2), 2056305120926495. <https://doi.org/10.1177/2056305120926495>
- Kristiyanto, H., Arinanto, S., & Ghafur, H. S. (2023). Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy. *Heliyon*, 9(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>
- Masullo, G. M., Wilner, T., & Stroud, N. J. (2022). What Social Media Could Be: Normative Frameworks

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

471

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 4 April 2026

- for Evaluating Digital Public Spaces. *Social Media + Society*, 8(4).  
<https://doi.org/10.1177/20563051221130447>
- Mietzner, M. (2020). Rival populisms and the democratic crisis in Indonesia: Chauvinists, Islamists and technocrats. *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 420–438.  
<https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1725426>
- Panebianco, A. (1988). *Political Parties: Organization and Power*. CUP Archive.
- Rahat, G., & Kenig, O. (2018). *From Party Politics to Personalized Politics?: Party Change and Political Personalization in Democracies*. Oxford University Press.
- Rahmayanti, R., & Siregar, B. (2025). Muhammadiyah's Political Dialectics in Partai Amanat Nasional: Elite Dynamics and Structural Accommodation. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 25(2), 249–278.  
<https://doi.org/10.24042/ajsk.v25i2.29444>
- Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Party Politics*, 8(1), 5–29. <https://doi.org/10.1177/1354068802008001001>
- Romli, L. (2016). Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2(2).
- Sedriyani, S. (2021). Partai Keadilan Sejahtera di Tengah Pusaran Tren Penurunan Anggota Partai: Bagaimana Cara Mereka Bertahan? *Jurnal PolGov*, 3, 41–84.  
<https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.2273>
- Skogerbø, E., & Karlsen, R. (2021). *Media and Politics in Norway*.
- Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2120>
- Tomsa, D. (2008). *Party politics and democratization in Indonesia: Golkar in the post-Suharto era*. Routledge.
- Vaccari, C., & Valeriani, A. (2021). *Outside The Bubble: Social Media and Political Participation in Western Democracies*. Oxford University Press.

## Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

472

